

### A. Pengertian Korporasi Petani

Pengembangan kawasan sentra pangan atau *food estate* (FE) didasarkan kepada beberapa target penting, antara lain untuk peningkatan produksi pangan nasional, memperkuat ketahanan pangan daerah, pengembangan wilayah, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Beberapa pertimbangan perlunya pengembangan FE di antaranya: (1) kebutuhan bahan pangan yang semakin meningkat akibat pertumbuhan penduduk; (2) berkurangnya daya pasok bahan pangan akibat alih fungsi lahan, terutama sawah-sawah irigasi untuk tujuan nonpertanian; (3) meningkatnya alokasi devisa negara untuk memenuhi kebutuhan beberapa komoditas strategis; (4) potensi lahan rawa di luar Pulau Jawa belum dimanfaatkan secara maksimal; dan (5) perlunya pelibatan investor dalam pengembangan FE.

Dipicu oleh kekhawatiran penyediaan pangan akibat pandemi Covid-19, Indonesia harus mampu meningkatkan kapasitas produksi pangan berskala luas, terpadu dan integratif dari berbagai aspek sebagai sentra produksi pangan. Dalam pengembangannya FE, beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya kondisi biofisik lahan, sosial ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pelibatan Pemda, perguruan tinggi, Kementerian Pertanian, kementerian/ lembaga lain seperti PUPR, perikanan dan kelautan, investor, dan petani

merupakan hal yang sangat diperlukan. FE adalah kawasan produksi pangan berskala luas dan terpadu meliputi aspek hulu sampai hilir. FE dijalankan berbasis pada RPJMN (Proyek Prioritas Strategis atau “*Major Project*”) dan Renstra Kementan 2020-2024. FE diposisikan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang akan dijalankan oleh korporasi petani, yakni badan usaha milik petani berbadan hukum (koperasi atau perusahaan).

Pemerintah dalam RPJMN tahun 2020-2024 telah menetapkan pemerintah sebuah proyek prioritas strategis (*major project*), suatu proyek terintegrasi yang menjadi dasar untuk membuat RPJMN lebih nyata dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, secara terukur, mudah dipahami dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Unsur-unsur yang terlibat dalam proyek ini kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan masyarakat/badan usaha. Proyek ini juga melakukan penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, berupaya mengintegrasikan 1.029 kluster komoditas pertanian basis produksi pertanian dengan akses pasar. Selanjutnya, pada Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024, disebutkan bahwa *food estate* merupakan “*Konsep pengembangan pangan terintegrasi meliputi pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan berskala luas dengan sistem industrial berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, organisasi dan manajemen modern dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan lestari yang berwawasan lingkungan dan kelembagaan yang kuat, serta dikelola secara profesional, serta didukung sumber daya manusia yang berkualitas.*” FE diposisikan sebagai Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Pengembangan FE dengan basis korporasi petani, secara nasional diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta membuka peluang bisnis secara lebih rasional dan efisien. Pengelolaan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan sistem produksi pangan yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Oleh karena itu, dukungan dan komitmen kuat pemangku kepentingan pada berbagai tingkat sangat diperlukan dalam pengembangan kawasan FE, sehingga korporasi petani mampu meningkatkan diversifikasi produksi, nilai tambah, daya saing, dan pendapatan petani.

Pengembangan *food estate* merupakan bentuk usaha pertanian skala besar yang berbasis klaster dan multikomoditas (tanaman pangan, hortikultura, ternak, perkebunan) yang dikembangkan dalam suatu sistem rantai nilai produksi yang terintegrasi hulu-hilir dengan mengembangkan mekanisasi modern, sistem digitalisasi, dan korporasi petani. *Food estate* juga diarahkan pada pengembangan sistem agribisnis yang berakar kuat di perdesaan dan berbasis pemberdayaan masyarakat adat atau penduduk lokal yang merupakan landasan dalam pengembangan kawasan dan wilayah pertanian.

Pendekatan pembangunan pertanian berbasis kawasan "*food estate*" lebih kurang dicirikan oleh empat hal berikut yaitu: (1) pembangunan pertanian terpusat dalam satu kawasan yang tergolong luas, yang didukung oleh faktor agroekologi zona yang sesuai, sehingga diperoleh keunggulan teknis dan efisiensi secara geografis; (2) mengembangkan komoditas pangan sebagai tanaman dominan, namun dapat dikombinasikan dengan tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan; (3) menerapkan teknologi yang paling baik dan maju, sehingga mampu mencapai produktivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan komoditas sejenis di wilayah lain; serta (4) menggunakan pendekatan konsolidasi usaha tani (*on farm*) dan sekaligus bisnis *off farm* yang dikelola oleh badan-badan usaha milik petani secara langsung dengan membangun dan mengoperasikan korporasi petani. Amanat pembentukan korporasi petani sesuai dengan Permentan No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani.

## 1. Sejarah Program *Food Estate* di Indonesia

Program *food estate* sudah beberapa kali dijalankan di Indonesia. Salah satu yang agak besar adalah *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) di Papua pada tahun 2006-2011, serta *Mega Rice Project in Peat Land* (MRP2L) atau Pengembangan Lahan Gambut Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah pada tahun 1995-1999. Proyek MIFEE direncanakan pada 2006 dengan luas 1 juta hektar dibagi dalam beberapa zona dan klaster. Sementara, proyek PLG di Kalimantan Tengah direncanakan pada tahun 1995 dengan luas hamparan 1 juta hektar yang terdiri dari lima blok kerja, tersebar di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Selatan. Proyek MIFEE dihentikan pada tahun 2015, sedang PLG dihentikan pada tahun 1999.

Inisiatif membangun FE juga pernah dilakukan. Pada tahun 2011-2014, Pemda Kalimantan Barat membangun *Rice Estate* di Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya pada tahun 2014-2018 Pemda Kalimantan Timur juga membangun *Rice Estate* di Kabupaten Kutai Kartanegara, Panajam dan Paser. Lokasi pengembangan FE di kedua provinsi tersebut memanfaatkan lahan rawa pasang surut yang merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), namun keberhasilan program ini relatif rendah. Pengembangan FE ke depan harus bercermin dari kegagalan pengembangan FE. Beberapa hal yang perlu diperhatikan menyangkut aspek teknis, sosial ekonomi, dan kebijakan. Aspek teknis misalnya, sarana pengelolaan air, dukungan alsintan, teknologi pemupukan, varietas, dan perlindungan tanaman. Aspek sosial ekonomi menyangkut keterlibatan petani, kelembagaan petani dan pertanian, pasar, dan dukungan modal. Sedangkan aspek kebijakan adalah dukungan dana dan program mendukung pengembangan FE. Seluruh *food estate* ini terbatas untuk pengembangan komoditas padi dan mengandalkan lahan rawa. Perlu disinggung sedikit kaitannya lahan rawa dengan gambut, mengingat kalimat di bawah ini langsung menyinggung gambut.

Hasil penelitian Puspitaloka (2018) menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk restorasi gambut bervariasi dari puluhan tahun hingga ratusan tahun tergantung tingkat kerusakannya. Hal ini didukung Hergoualch, *et al.*, (2018) bahwa restorasi lahan gambut adalah solusi potensial, namun keberhasilannya akan tergantung pada bagaimana beragam prioritas direkonsiliasi, melakukan pengelolaan lebih baik dan pembangunan kapasitas teknis secara memadai. Namun, banyak contoh pengembangan pertanian di lahan rawa yang berhasil dan berkembang dengan baik, meskipun tidak melalui program *food estate*, contohnya adalah UPT Terusan di Kalimantan Tengah, UPT Terantang di Kalimantan Selatan, UPT Telang dan Delta Upang di Sumatera Selatan. Pengembangan pertanian di lahan rawa seperti di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat cukup berhasil dan menjadi pemasok bahan pangan bagi daerah di sekitarnya. Terakhir, mulai tahun 2020, pemerintah menggulirkan Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut *food estate* yang akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua (Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, 2020).

Pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani di lahan rawa Kalimantan Tengah dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan Kalimantan Tengah sebagai lokasi salah satu Lumbung Pangan Nasional. Program ini berupaya membangun keterpaduan dalam satu sistem rantai nilai produksi pangan berskala luas pada suatu kawasan.

Program ini dijalankan dengan membangun korporasi petani, sehingga petani lah yang menjadi aktor utamanya melalui kelompok-kelompok dan badan usaha, sehingga seluruh nilai tambah dari kegiatan ini menjadi milik petani. Korporasi petani terbentuk melalui konsolidasi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Klaster merupakan satu pendekatan yang paling efektif untuk mengelola pembangunan daerah (Andriushchenko, *et al.*, 2020). Pendekatan klaster dibentuk dengan mempertimbangkan efek sinergis afirmatif dari aglomerasi regional, efek jaringan, difusi inovasi dapat menjadi akselerator pengembangan sikap sosial dan ekonomi daerah-daerah sulit, mencegah deprivasi wilayah pedesaan (Iuliia, *et al.*, 2016).

Kegiatan ini dijalankan pada lahan “rawa sulfat masam” yang memiliki kendala yang lebih berat sehingga memerlukan penanganan yang tepat dan sungguh-sungguh. Satu ciri khas lahan ini dibanding jenis lahan rawa lain adalah keberadaan pirit, yang menjadi kendala utama dalam pengembangan lahannya untuk budi daya padi. Permasalahan muncul ketika pirit terpapar oleh oksigen akibat terjadi kekeringan atau drainase berlebihan dan penggalian saluran yang dalam mengakibatkan pirit teroksidasi.

Bertani di atas lahan ini membutuhkan keterampilan yang berbeda. Persyaratan teknis ini pada gilirannya akan menentukan seberapa jauh hasil produksi, yang berikutnya bersinggungan dengan aspek sosial ekonomi pula yakni keuntungan dan biaya. Pada gilirannya ini semua membutuhkan manajemen kelembagaan yang khas, baik pada tahap *on farm* maupun *off farm*-nya. Dengan kata lain, diperlukan model kelembagaan agribisnis yang berbeda.

Potensi bisnis yang akan diperoleh korporasi petani, jika unit bisnis berupa kawasan dalam satu kecamatan. Kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi agribisnis wilayah, melakukan *assessment* kapasitas kelembagaan agribisnis kawasan, serta menyusun model dan strategi penumbuhan dan pengembangan korporasi petani.

Narasumber dan responden dalam kegiatan ini adalah petani secara individual, pengurus organisasi petani (kelompok tani, P3A, UPJA, Gapoktan, dan lain-lain), petugas PPL, pedagang, penyedia jasa alsintan, pelaku pengolahan, serta instansi pemerintah daerah. Survei rancangan kelembagaan korporasi petani menggunakan areal kecamatan sebagai unit studi, yakni Kecamatan Pandih Batu (Kabupaten Pulang Pisau) dan Kecamatan Bataguh (Kabupaten Kapuas). Analisis dibatasi hanya untuk pengembangan padi sebagai komoditas utama dalam program ini.

## **2. Pendekatan dan Strategi *Food Estate* Kalimantan Tengah**

Dari buku “*Grand Design* Pengembangan Kawasan *Food Estate* Berbasis Korporasi Petani di Lahan Rawa Kalimantan Tengah” (Kementan, 2020), disebutkan bahwa pengembangan kawasan *food estate* berbasis korporasi petani dilakukan pada lokasi lahan rawa eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) Satu Juta Hektar. Sejak tahun 1980-an sebagian lahan sudah dimanfaatkan sejak tahun 1980-an, lahan ini sebagian telah dimanfaatkan untuk budi daya padi, dan sebagian belum dimanfaatkan dan berada di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dan Area Penggunaan Lain (APL).

Rancangan *Food Estate* Kalteng dibagi atas kawasan dan klaster. Setiap “kawasan” memiliki luas sekitar 10.000 ha, dan setiap kawasan terbagi atas beberapa “klaster”. Satu klaster dengan luasan 2.000-5.000 ha. Kawasan dan klaster dibatasi berdasarkan wilayah administratif, faktor geografis dan kesatuan sosial ekonomi, pertimbangan teknis, ekonomi, dan sosial kelembagaan.

Luas lahan yang dialokasikan untuk *food estate* sekitar 165.000 ha yang sebagian besar berlokasi di Eks PLG. Pada tahap awal tahun 2020 dikembangkan tiga kawasan masing-masing 10.000 ha, di mana dua kawasan terletak di Kabupaten Kapuas yang terbagi dalam lima klaster, dan satu kawasan di Kabupaten Pulang Pisau yang terbagi dalam tiga klaster.

## **B. Gambaran Keberhasilan Usaha Tani Padi**

Tim Studi (Syahyuti, *et al.*, 2020) mengumpulkan data *baseline* pada dua lokasi yaitu Desa Terusan Mulya dan Terusan Karya Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas serta Desa Belanti Siam Kecamatan Pandih

Batu Kabupaten Pulang Pisau. Desa-desa ini dipilih secara sengaja (*purposive*) sebagai wilayah yang kemajuan pertaniannya paling baik. Riset dilakukan bulan September-Oktober 2020.

Dengan total populasi petani di lokasi sebanyak 1.154 dan galat ditetapkan sebesar 10%, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 90 orang untuk kedua kecamatan, atau 45 orang per kecamatan. Selanjutnya, penentuan jumlah responden pada setiap kelompok tani ditentukan secara proporsional mempertimbangkan total jumlah anggota kelompok tani. Dengan metode penarikan sampel seperti ini diperoleh responden di Desa Terusan Karya, Terusan Mulya dan Belanti Siam masing-masing 45 orang/rumah tangga.

Rata-rata lahan milik petani responden di Belanti Siam lebih luas dibandingkan di Terusan Karya dan Terusan Mulya, yaitu 2,85 ha vs 2,23 ha. Demikian juga untuk lahan non-milik (sewa) di Belanti Siam lebih luas dibanding di Terusan yaitu 0,75 ha vs 0,60 ha. Adapun untuk lahan pekarangan, luas pekarangan milik petani di Terusan lebih besar dibandingkan di Belanti Siam yaitu 0,17 ha vs 0,14 ha.

Hasil analisis usaha tani pada musim hujan (MH) menunjukkan rata-rata produktivitas padi di Desa Terusan Karya dan Terusan Mulya sebesar 3.194 kg GPK per hektar dengan harga jual Rp4.202/kg. Total pendapatan bersih yang diperoleh sebesar Rp5.337.123/ha dengan RC rasio 1,66. Sementara di Belanti Siam rata-rata produksi Siam sebesar 3.273 kg/ha dengan harga Rp4.208/kg, total pendapatan bersih yang diperoleh petani pada musim hujan sebesar Rp6.571.970/ha dengan RC rasio 1,91. Pada musim kemarau (MK) terjadi peningkatan produktivitas baik di Terusan maupun Belanti Siam. Peningkatan juga terjadi pada harga jual gabah. Rata-rata produksi MK di Desa Terusan Karya/Mulya sebesar 4.191 kg/ha dan rata-rata harga GPK Rp4.239/kg.

Total pendapatan yang diperoleh petani pada MK sebesar Rp9.099.087/ha dengan RC rasio 2,05. Di Belanti Siam produktivitas sebesar 3.826 kg/ha, rata-rata harga GPK Rp4.220/kg. Total pendapatan yang diperoleh petani pada MK sebesar Rp8.618.239/ha dengan RC rasio 2,14. Dengan demikian, secara finansial usaha tani padi di Kawasan *Food estate* tersebut sangat layak untuk diusahakan. Dengan dasar data tersebut di atas, analisis Kelayakan Usaha Agribisnis Beras FE Kalteng dengan luas 10.000 m selama 10 tahun memberikan nilai *Present Value* Total Biaya sebesar 1.795, *Present Value* Total Penerimaan 6.641, *Present*

Value Total Pendapatan (NPV) 4.846, dan RC Rasio 3,70 (Syahyuti, *et al.*, 2020). Informasi ini memberikan gambaran positif terhadap besarnya peluang pengembangan usaha tani padi di lahan rawa sulfat masam di Kalteng. Gambaran dari dua lokasi di atas menunjukkan bahwa lahan sulfat masam dapat dioptimalkan dan produktivitas usaha tani di atasnya juga sangat menguntungkan, meskipun untuk mencapainya membutuhkan waktu belasan tahun.

## C. Rancangan Bisnis dan Korporasi Petani

### 1. Potensi Bisnis dan Rancangan Korporasi Petani Kecamatan Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau

Dari total 16 buah desa, ada 11 buah desa yang menjadi lokasi *food estate* tahun 2020. Kesebelas desa tersebut adalah Desa Belanti Siam, Gadabung, Kantan Muara, Karya Bersama, Mulyasari, Pangkoh Hulu, Pantik, Sanggang, Talio, Talio Hulu, dan Talio Muara. Belum ada data yang konsisten tentang luas baku sawah di Kecamatan Pandih Batu. Setiap sumber data menunjukkan luas yang berbeda-beda. Menurut satu sumber, sesungguhnya luas baku sawah pernah mencapai lebih 24.000 ha. Dengan berbagai pertimbangan, dan sesuai dengan data resmi yang dilaporkan oleh BPP, maka data luas baku sawah di wilayah ini dipaparkan sebagaimana Tabel 50. Luas baku sawah total 13.606 ha, di mana sekitar 5.000-an ha masuk menjadi lokasi FE tahun ini. Kegiatan FE, dan juga rancangan kelembagaan korporasinya ke depan, pada hakikatnya akan mencakup seluruhnya, yakni yang sudah IP 200%, IP 100% dan yang masih bera (IP 0%).

Khusus untuk padi yang dua kali tanam, musim hujan bulan Oktober-Maret dan musim kemarau bulan April-September. Varietas padi yang biasa ditanam petani adalah Supadi dan Sembada (hibrida), Inpari 32, Inpari 42, Sentani (inbrida). Produktivitas padi varietas Inpari 32, Inpari 34, dan Sentani sekitar 4 ton/ha. Benih hibrida didapat dari sales (swasta), sedangkan benih inbrida diperoleh dari *online*. Selain padi sawah, Desa Kantan Dalam misalnya juga mengusahakan padi gogo seluas 56 ha dengan IP 100, di mana produktivitas padi gogo sekitar 1,5 ton/ha.

**Tabel 49.** Luas Baku Sawah dan IP Padi di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau

No.	Desa	Indeks Pertanaman Padi (ha)			Luas Baku Sawah (ha)
		IP 2	IP 1	IP 0	
1.	Belanti Siam	2250	-	-	2250
2.	Dandang	-	-	265	265
3.	Gadabung	1212	101	-	1313
4.	Kantan Atas	-	-	185	185
5.	Kantan Dalam	-	121	169	290
6.	Kantan Muara	-	302	222	524
7.	Karya Bersama	65	215	-	280
8.	Mulyasari	396	1393	-	1789
9.	Pangkoh Hilir	285	-	15	300
10.	Pangkoh Hulu	250	909	-	1159
11.	Pangkoh Sari	-	-	50	50
12.	Pantik	642	120	-	762
13.	Sangang	717	-	125	842
14.	Talio	25	-	1155	1180
15.	Talio Hulu	854	400	218	1472
16.	Talio Muara	15	-	930	945
		6.711	3.561	3.334	13.606

Sumber: BPP Pangkoh (2020)

Secara umum, luas sawah semakin menurun. Di Desa Talio Hulu, saat ini sawah semakin menyusut, di mana luas lahan sawah yang eksis (digarap) tinggal 850 ha. Sementara, luas lahan sawah yang belum digarap 800 ha dan berpotensi untuk cetak sawah baru. Penyebab lahan sawah pada MT II (MK) tidak digarap karena serangan tikus, petani bekerja di *non farm* sebagai penambang, petani bekerja di luar daerah/merantau, beralih ke perkebunan seperti karet, sawit, dan kelapa dalam.

Untuk pemasaran beras, kelas beras yang dihasilkan oleh RMU adalah kelas medium. Beras medium di lokasi dijual seharga Rp90.000-Rp95.000 per 10 kg dan di luar lokasi (Palangka Raya) Rp110.000-Rp114.000 per 10 kg. Harga gabah kering giling padi hibrida Rp5.300-Rp5.500/kg, sedangkan variates inbrida 4.800/kg. Gabah dengan rendemen rendah dijual ke luar wilayah (Banjarmasin), sedangkan

gabah yang rendemennya bagus untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Petani tidak mempunyai jumlah *dryer* yang cukup, sehingga melakukan pengeringan menggunakan matahari dengan upah penjemuran gabah berkisar Rp200.000-Rp250.000 per ton. Dengan penguasaan lahan yang cukup luas, petani tidak terlalu terpaksa untuk menjual saat harga gabah rendah. Mereka menjual setelah dikeringkan, dan harga agak meningkat. Gabah dari Desa Belanti Siam sebagian besar diambil pedagang dari Kalimantan Selatan dan RMU di Kahayan Hilir (luar Desa Belanti).

Kegiatan program FE pada hakikatnya adalah usaha untuk melakukan optimalisasi sumber daya yang ada seperti kombinasi ekstensifikasi (perluasan tanam dan peningkatan IP) dan intensifikasi (peningkatan produktivitas lahan melalui adopsi teknologi). Dengan pemikiran demikian, maka skenario FE di Kecamatan Pandih Batu ada 2 opsi. Opsi pertama (*moderate*) yakni peningkatan IP 0 menjadi IP 1, IP 1 menjadi IP 2, dan intensifikasi IP 2; maka akan ada 23.878 ha total luas tanam dengan potensi produksi total menjadi 93,6 ribu ton. Berikutnya, hasil yang lebih besar akan dicapai bila mengikuti opsi II (*maksimal*).

Jika seluruh area Kecamatan Pandih Batu menjadi 1 unit korporasi petani, nilai potensi bisnis yang diperoleh cukup besar. Nilai ekonomi yang besar ini sesungguhnya belum pernah disadari petani selama ini. Khusus dari *on farm* usaha tani padi, yakni luas tanam total 16.983 ha, nilai bisnisnya adalah Rp238,8 miliar setahun. Perhitungan ini adalah jika produktivitas 3.918 kg/ha dan harga Rp4.200/kg GKP. Selanjutnya, perhitungan nilai bisnis *on farm* untuk kelapa, jeruk dan itik merupakan simulasi dengan pemikiran bahwa FE akan mengembangkan berbagai komoditas sekaligus (*multikomoditas*).

**Tabel 50.** Opsi Skenario Pendekatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau

Skenario	Peningkatan IP	Luas Tanam Setahun (ha)	Produksi Gabah Total (ton GKP per tahun)
Existing		16.983	66.500
I (=moderate)	IP 0 – 1	23.878	93.600
	IP 1 – 2		
	IP 2 – 2		
II (=maksimal)	IP 0 – 1	27.212	106.600
	IP 1 – 2		
	IP 2 – 2		

Keterangan: basis kalkulasi menggunakan produktivitas padi existing = 3.918 kg/ha sesuai hasil studi *Baseline*.

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Khusus untuk bisnis *off farm* padi, nilai potensi pendapatan dari 5 bisnis disampaikan pada Tabel 51 berikut. Bisnis tersebut berupa usaha perbenihan padi, usaha jasa Alsintan (*transplanter* dan *combine harvester*), permodalan, serta produksi beras premium. Nilai usaha pengolahan gabah menjadi beras premium tergolong paling besar yakni Rp30,5 miliar per tahun, ditambah dari penjualan *by product* berupa dedak dan menir.

Kawasan *food estate* di lahan rawa Kalimantan Tengah diarahkan dan dirancang untuk mengembangkan korporasi petani dengan tujuan agar petani terlibat secara optimal dalam keseluruhan rantai produksi usaha tani. Petani tidak hanya berdaulat dalam pengelolaan *on farm*, tetapi juga pada *off farm* dan pemasaran. Dalam Permentan No. 18 Tahun 2018, disebutkan bahwa korporasi petani adalah “*Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.*” Korporasi petani adalah suatu kesatuan badan usaha yang dibentuk dari, oleh dan untuk petani. Korporasi petani dibentuk dalam upaya merestorasi jiwa gotong royong petani. Usaha korporasi petani juga merupakan basis untuk mendukung usaha tani. Sebaliknya pengembangan usaha korporasi harus didukung oleh usaha tani individu petani. Korporasi petani dimiliki bersama petani anggota korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu, pengembangan korporasi petani diarahkan untuk mewujudkan petani berdaulat dalam mengelola keseluruhan rantai produksi usaha tani.

**Tabel 51.** Potensi Bisnis *Off Farm* dan Usulan Kelembagaan Korporasi Petani Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau per Tahun

No.	Jenis Usaha	Nilai Bisnis (Rp/tahun)	Usulan Kelembagaan
1.	Produksi benih unggul	Rp895,4 juta (598 ton benih)	Dikelola 2 koperasi di Desa Sanggang dan Belanti Siam
2.	Usaha jasa alsintan <i>rice tranplanter</i>	Rp5,6 miliar	Dikelola koperasi pelayanan jasa alsintan, di 6 desa sentra padi
3.	Usahajasa <i>combine harvester</i>	Rp6,7 miliar	Dikelola koperasi pelayanan jasa alsintan, di 6 desa sentra padi
4.	Permodalan usaha tani	Rp1,3 miliar	Dikelola 16 koperasi, masing-masing 1 unit per desa
5.	Pengolahan beras premium	Rp30,5 miliar (+ bekatul 91,7 juta)	Dikelola koperasi utamanya di 6 desa sentra padi

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Setiap bisnis akan dikelola oleh BUMP berbadan hukum koperasi, dengan pertimbangan kemudahan proses pendirian, manajemen, dan administrasi, serta sifatnya yang demokratis. Pertimbangan jenis dan jumlah koperasi didasarkan atas skala usaha dan beban manajemen, serta aspek geografis (transportasi dan komunikasi antarlokasi).



**Gambar 76.** Konfigurasi Korporasi Petani Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Kapuas

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Berkenaan dengan kesiapan kelembagaan pendukung usaha tani padi, untuk penangkar benih, KT Tani Muda Jaya di Desa Sanggang telah biasa memproduksi Inpari 42. Kelompok ini beranggotakan 15 orang petani. Pembentukan kelompok penangkar ini karena banyak pemuda yang betah tinggal di kampung dan memiliki potensi untuk menjadi petani penangkar benih. Kegiatan perbenihan padi dimulai pada tahun 2018, di mana luas lahan yang digunakan untuk perbenihan mencapai 41 ha. Produksi benih yang dihasilkan per musim mencapai 80-100 ton. Kegiatan perbenihan ini dilakukan melalui sistem kontrak dengan PT Pertani, di mana kontrak dibuat setelah dilakukan uji benih. Gabah petani dibayar oleh kelompok sebesar Rp6.500/kg, sedangkan harga gabah yang menjadi benih padi dibayar PT Pertani sebesar Rp7.000/kg.

Sementara dari sisi alsintan, pengolahan tanah telah seluruhnya menggunakan traktor, milik petani masing-masing. Sementara, penggunaan *combine harvester* juga sudah berkembang. Bahkan pengusaha *combine harvester* memberikan pinjaman uang untuk penyediaan/pembelian sarana produksi dengan perjanjian nanti memperoleh "hak panen". Panen dilakukan menggunakan *combine harvester* dengan sistem bawon 8:1.

Jumlah Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sebanyak 5 unit, yaitu di Desa Belanti Siam, Gadabung, Kantan Dalam, Mulyasari, dan Talio Hulu. Ada 12 RMU kecil dan 2 RMU besar, dikelola secara pribadi, sedangkan di Desa Gadabung ada 12 RMU kecil. Untuk alsintan, jumlah Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sebanyak 5 unit, yaitu di Desa Belanti Siam, Gadabung, Kantan Dalam, Mulyasari, dan Talio Hulu.

Untuk pembiayaan usaha tani, umumnya petani menggunakan permodalan sendiri dan KUR BRI Unit Pandih Batu. KUR mikro dengan plafon Rp20-Rp30 juta, pola pembayaran Yarnen selama 6 bulan. Belum ada LKMA atau koperasi yang menyediakan permodalan. Usaha permodalan sangat potensial dikembangkan di wilayah ini.

## **2. Potensi Bisnis dan Rancangan Korporasi Petani Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas**

Kecamatan Bataguh terdiri atas 14 desa dan 1 kelurahan. Kondisi geografis kecamatan ini terbagi menjadi beberapa bagian, karena terpisah oleh sungai dan saluran primer lain. Berdasarkan kemudahan

transportasi, maka wilayah kecamatan terbagi atas beberapa areal yang sering disebut dengan istilah “pulau”. Area yang paling maju ada di bagian selatan yang mencakup 4 desa yaitu Desa Terusan Mulya, Terusan Karya, Terusan Makmur, serta Baguntan Raya. Selebihnya, merupakan daerah yang pertaniannya masih terbatas karena sebagian merupakan lahan sawah pasang surut type A yang sangat mudah tergenangi air. Sehingga, petani cenderung untuk menanam padi varietas lokal.

Selain di daerah selatan, ada desa yang cukup potensial untuk dikembangkan menjadi wilayah *food estate*, yaitu di Desa Sei Jangkit. Kelebihan lokasi ini adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau melalui kendaraan darat (tanpa penyeberangan kapal). Selain itu, lokasi ini potensial untuk dilakukan tanam IP200. Permasalahannya adalah kondisi irigasi yang masih kurang terawat dengan baik sehingga proses salinasi air tidak berjalan dengan baik. Kendala budaya juga menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi.

Kondisi geografis Kecamatan Bataguh cukup berbeda dibandingkan dengan Kecamatan Pandih Batu. Di Pandih Batu seluruh wilayah bisa terjangkau melalui transportasi darat, sehingga dapat dipandang sebagai satu kesatuan wilayah ekonomi. Namun, wilayah Kecamatan Bataguh terpisah oleh berbagai sungai, sehingga setidaknya terdiri atas tiga “pulau”.

Luas wilayah Kecamatan Bataguh 28.226 ha yang terbagi menjadi 14 desa dan 1 kelurahan yang digunakan untuk lahan pertanian, pekarangan, pemukiman, fasilitas umum, lahan restan. Lahan pertanian digunakan untuk budi daya tanaman hortikultura, palawija, dan tanaman pangan. Budi daya tanaman padi baik padi varietas unggul baru (VUB) pada musim tanam Asep dan Okmar maupun padi Varietas Unggul Lokal (VUL) pada musim tanam Asep. Secara umum jenis tanah yang terdapat dalam kawasan wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bataguh adalah jenis tanah aluvial dan gambut. Berdasarkan tingkat kendala yang dihadapi, daerah ini termasuk dalam tipologi lahan bergambut dan lahan sulfat masam, keracunan senyawa pirit dan tingkat keasaman tanah yang cukup tinggi. Dari sisi lahan, kondisi potensi sumber daya lahan sangat berpotensi untuk dikembangkan berupa rawa pasang surut tipe A dan B.

Satu kendala penting di wilayah ini adalah di mana sebagian besar wilayah masih mengandalkan transportasi sungai. Masih terbatasnya

transportasi darat sehingga sulit dijangkau dan hampir tidak bisa lewat darat utamanya untuk aktivitas transportasi barang dalam skala besar. Jarak tempuh transportasi sungai lebih mahal biayanya.

Dari total 13.000 ha lebih total baku sawah di kecamatan ini, hampir setengahnya masih dengan indeks pertanaman 1 kali setahun. Namun, lahan yang masih diberakan (IP 0) juga masih cukup luas, yakni 2.686 ha utamanya berada di Desa Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu, Bamban Raya, Budi Mufakat, Terusan Raya. Pertanian sawah yang tergolong sudah lebih maju, yakni yang sudah bisa melakukan penanaman 2 kali setahun, terbatas hanya di tiga desa yakni Terusan Mulya, Terusan Karya, dan Terusan Makmur. Ketiga desa ini merupakan desa transmigrasi dengan dukungan sarana dan prasarana irigasi dan lain-lain yang lebih baik.

Luas lahan yang memperoleh program FE tahun 2020 seluas 5.350 ha. Perkembangan usaha tani padi di wilayah ini sungguh timpang. Selain tiga desa sentra padi (Terusan Karya, Mulya, dan Makmur) yang semuanya desa transmigrasi tahun 1983, 12 desa lainnya masih sangat tertinggal.

**Tabel 52.** Opsi Skenario Pendekatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kecamatan Bataguh Kapuas

"Pulau"	IP Padi	Luas (ha)	Desa
A	IP 2	4.079	Terusan Mulya, Terusan Karya, Terusan Makmur, Baguntan Raya
B	IP 1	6.586	Mambulau, Sei Linuk, Pulau Kupang, Jangkit, Tamban Luar, Bangunharjo
C	IP 0	2.686	Terusan Raya Barat, Terusan Raya Hulu, Bamban Raya, Budi Mufakat, Terusan Raya
<b>Total</b>		<b>13.352</b>	<b>14 desa + 1 kelurahan</b>

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Berdasarkan kondisi sumber daya pertanian tersebut, maka skenario pengembangan pertanian padi sawah adalah sebagaimana Tabel 53 berikut. Dengan skenario moderate, kegiatan FE di Kecamatan Bataguh mampu meningkatkan luas tanam menjadi 24.016 ha dengan potensi produksi 89,7 ribu ton gabah per tahun. Sedangkan dengan

skenario maksimal, akan dapat dicapai peningkatan hampir 2 kali lipat dibandingkan kondisi eksisting.

**Tabel 53.** Opsi Skenario Pendekatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas

Skenario	Peningkatan IP	Luas Tanam Setahun (ha)	Produksi Gabah Total (ton GKP per tahun)
Existing		14.744	55.100
I (=moderate)	IP 0–1	24.016	89.700
	IP 1–2		
	IP 2–2		
II (=maksimal)	IP 0–2	26.702	99.800
	IP 1–2		
	IP 2–2		

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Dengan kalkulasi yang menggunakan basis data riil dari lapang dan potensi sumber daya wilayah, maka Tabel 54 menunjukkan nilai bisnis yang dapat diperoleh oleh korporasi petani, serta sekaligus usulan kelembagaannya. Khusus untuk *on farm* usaha tani padi, dengan asumsi program *food estate* berjalan optimal, maka akan ada total pertanaman seluas 26.702 ha dengan produksi padi 99,8 ribu ton setahun. Total nilai bisnis *on farm* padi ini adalah Rp90,9 miliar. Selanjutnya, untuk berbagai bisnis *off farm* mulai dari bisnis produksi benih padi unggul, distributor sarana produksi, usaha jasa alsintan dan pengolahan beras premium juga disampaikan pada Tabel 54 berikut.

Usulan kelembagaan pengelola korporasi petani Kecamatan Bataguh sebagaimana digambarkan berikut, ditata dalam tiga kelompok besar sesuai dengan kendala geografis yang ditemui di lapang. Setiap areal ditata untuk memiliki sarana pendukung ekonomi secara mandiri. Kios di Kecamatan Bataguh ada lima, yaitu di Sei Jangkit, Tamban Luar, Bangun Harjo, Terusan Mulya, dan Terusan Karya.

**Tabel 54.** Potensi Bisnis Korporasi Petani dari Kegiatan *Off Farm* Padi di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas per Tahun

No.	Jenis Usaha	Nilai Bisnis (Rp/tahun)	Usulan Kelembagaan
1.	Produksi benih unggul	Rp400,5 juta	Dikelola 3 koperasi, 1 pada setiap "pulau"
2.	Distributor pupuk bersubsidi	Rp1,7 miliar	Dikelola 3 koperasi, 1 pada setiap "pulau"
3.	Distributor obat/pestisida	Rp1,3 miliar	Dikelola 3 koperasi, 1 pada setiap "pulau"
4.	Usaha jasa alsintan TR4	Rp36,0 miliar	Dikelola koperasi pelayanan jasa alsintan, di 3 "pulau"
5.	Usaha jasa <i>combine harvester</i>	Rp39,9 miliar	Dikelola koperasi pelayanan jasa alsintan, di 3 "pulau"
6.	Pengolahan beras premium	Rp10,7 miliar	Dikelola koperasi, 1 koperasi per "pulau"

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Saat ini, kesiapan sarana pendukung bisnis korporasi petani yang berpotensi tersebut masih lemah. Tabel berikut memperlihatkan bahwa kondisi sarana alsintan serta jasa-jasa yang tersedia belum memadai untuk usaha bisnis korporasi yang bermaksud mengoptimalkan segala potensi yang ada dari hulu sampai ke hilir. Kekurangan alsintan dirasakan untuk seluruh jenis alat, utamanya untuk alat panen *combine harvester* (CH). Hampir semua CH yang ada hanya terdapat di tiga desa yakni Terusan Mulya, Terusan Karya, dan Terusan Makmur. Ini adalah tiga desa yang kondisi pertanian padi paling maju di Kecamatan Bataguh. Demikian pula dengan keberadaan pelayanan usaha yang lain, terlihat ketimpangan antara ketiga desa ini dengan desa-desa lain.

## Usulan kelembagaan pengelola korporasi petani Kec BATAGUH:



**Gambar 77.** Konfigurasi Korporasi Petani Kecamatan Bataguh

Sumber: Sintesis data primer (2020)

Keberadaan KEP berbentuk koperasi sangat lemah. Dulu pernah ada koperasi di Desa Terusan Mulya, namun saat ini sudah berubah menjadi Usaha Dagang (UD) milik pribadi. Untuk Gapoktan telah terbentuk 15 unit, sedangkan total kelompok tani 243 unit (BPP Bataguh, 2019). UD bergerak dalam jual pupuk, beli gabah, memiliki usaha sewa *combine harvester*. UD juga memberi pinjaman pupuk dan dibayar saat petani panen. Harga pupuk sesuai harga pasaran, dan petani yang pinjam pupuk nanti akan menjual gabah ke UD tersebut.

Untuk pemasaran padi, RMU desa banyak yang siap membeli gabah (GKP) dari petani dan menjemurnya sendiri. Selanjutnya RMU menggiling sendiri dan menjual dalam bentuk beras medium ke Banjarmasin. Potensi pasar beras masih sangat terbuka, untuk memenuhi pasar di Kota Banjarmasin maupun Palangka Raya. Dengan melakukan proses pengolahan dan pemasaran, maka kawasan pertanian (*agriculture clusters*) dapat meningkat menjadi kawasan agroindustri (*agro-industrial clusters*). Penelitian Otsuka dan Ali (2020), mendapatkan bahwa ini hanya dapat terjadi bila dilakukan penyediaan teknologi dan infrastruktur dasar pedesaan yang lebih baik, memobilisasi pemangku kepentingan ke dalam berbagai kelompok (seperti koperasi petani dan asosiasi pengolah hasil pertanian); memberikan pelatihan teknologi dan manajerial para pemangku kepentingan melalui kelompok-kelompok ini; mempromosikan tindakan kolektif mereka untuk inovasi; dan menerapkan kerangka peraturan yang tepat.